

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014-2016**

**Arfie Yasrie**

*Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin  
Jl. Kuripan No. 26 Banjarmasin  
arfie.yasrie@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The study was conducted to analyze the financial performance of the local government of Kalimantan Selatan Province in last three years (2014-2016) with a ratio analysis of financial independence, effectiveness and efficiency of the PAD, the ratio of routine expenditure to total expenditure, the ratio of development expenditure to total expenditure, growth ratios, as well as aspects of the analysis financing.*

**Keywords : Financial Performance, Ratio Analysis, APBD, Income, Spending, Financial**

**PENDAHULUAN**

Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adanya Undang-Undang tersebut telah mengakibatkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah kearah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Astuti, 2015).

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap APBD yang dilakukan pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan

baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah tersebut adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Nurhayati, 2015).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah PP No. 58 Tahun 2005 (4) tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah. APBD itu sendiri terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri bagi pemerintah (Kadek Martini, 2015). Perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran diukur dengan menggunakan beberapa rasio berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio ekonomi, kemampuan keuangan daerah dan rasio keserasian.

Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memikul suatu tugas yang harus memberikan inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri di dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahnya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah diperlukan pendanaan yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien, dan akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur *financial* maupun non finansial

(Ihyaul Ulum, 2012 :20). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain : pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kemudian ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Di dalam penilaian indikator kinerja minimal ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu : penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD, efisiensi Biaya, efektivitas program dan pemerataan dan keadilan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah : Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir (Tahun 2014-2016) dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi PAD, rasio belanja rutin terhadap total belanja, rasio belanja pembangunan terhadap total belanja, rasio pertumbuhan, serta analisis aspek pembiayaan.

Tujuan dari penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir (2014-2016) dengan analisis rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi

PAD, rasio belanja rutin terhadap total belanja, rasio belanja pembangunan terhadap total belanja, rasio pertumbuhan, serta analisis aspek pembiayaan.

### TINJAUAN TEORITIS

#### APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi 3 pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Pendapatan daerah menurut Pasal 20 ayat 1 huruf a terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - b. Dana Perimbangan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kelompok belanja terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja modal

- d. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
  - e. Bunga
  - f. Subsidi
  - g. Hibah
  - h. Bantuan sosial
  - i. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
  - j. Belanja tidak terduga
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup hal-hal berikut ini :
    - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
    - b. Pencairan dana cadangan
    - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - d. Penerimaan pinjaman
    - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 Pengeluaran pembiayaan mencakup :
    - a. Pembentukan dana cadangan
    - b. Penyertaan modal pemerintah daerah, termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah
    - c. Pemberian pinjaman.

#### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut M. Yusuf (2010 :1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen asset yang tercerminkan dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan

pemerintah daerah terdiri dari : neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 4 finansial maupun nonfinansial (Ihyaul Ulum, 2012 :20). Menurut Halim (2012:24) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Didalam penilaian indikator kinerja sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur

penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu :

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD
2. Efisiensi Biaya
3. Efektivitas Program
4. Pemerataan dan Keadilan

Menurut Widodo dalam Halim (2012:5) terdapat beberapa analisis rasio dialam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam tabel seperti tampak pada tabel berikut ini :

**Tabel Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber : Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim, 2012.

- b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Mahsun (2006 : 187) rasio efektivitas diukur dengan :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan potensi riil daerah}}$$

**Tabel Efektifitas Keuangan Daerah**

<b>Efektifitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Efektifitas (%)</b>
Tidak Efektif	X<100%
Efektif Berimbang	X=100%
Efektif	X>100%

Sumber : Moh. Mahsun, 2006.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$$

**Tabel Efisiensi Keuangan Daerah**

<b>Times</b>	<b>Rasio Efisiensi (%)</b>
Tidak Efisien	X>100%
Efisien Berimbang	X=100%
Efisien	X<100%

Sumber : Moh. Mahsun, 2006.

- c. Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Menurut Widodo dalam Halim (2012:8) secara sederhana rasio aktivitas itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

d. Rasio Pertumbuhan

Menurut Ihyaul Ulum (2012:33) rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

$$\text{Realisasi Penerimaan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan } \Sigma \text{ pendapatan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan } \Sigma \text{ pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

$$\text{Rasio pertumbuhan belanja pembangunan} = \frac{\text{Realisasi belanja pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi belanja pembangunan PAD } X_{n-1}}$$

Keterangan :

$X_n$  = Tahun yang dihitung

$X_{n-1}$  = Tahun sebelumnya

e. Tinjauan Peneliti Terdahulu

1. Ahzir Erfa (2008), Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dengan judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Otonomi Khusus (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara).
2. Martha Yurdila Janur (2009), Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul : Analisis terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah tahun 2003 – 2007.
3. Ayu Febriyanti Puspitasari (2013) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Dalam penelitian kuantitatif masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut (Sugiyono 2007:47).

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengambilan data yang dilakukan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dimana salah satu fungsinya sebagai pengelola keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di Jl. Aneka Tambang - Trikora Banjarbaru Kalimantan Selatan.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai satu-satunya jenis data. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dapat diukur, dan dilakukan perhitungan serta perlu ditafsirkan terlebih dahulu agar menjadi suatu informasi.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada dari dokumen resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Data sekunder ini terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan yaitu untuk tahun 2014-2016 serta

data pendukung lainnya, data statistik Provinsi Kalimantan Selatan dalam angka periode 2014-2016, data dari Ditjen Perbendaharaan Wilayah Kalimantan Selatan serta data realisasi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara *Logging data*, yaitu saat pengumpulan data. Pada tahapan terakhir ini proses mengumpulkan data penelitian yang diperlukan, maka menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

#### a. Wawancara (interview)

Teknik ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal dan terstruktur guna menggali pandangan dan informasi dari obyek yang diteliti dari informan tersebut. Informan pada penelitian ini adalah Staf Bagian Akuntansi dan bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

#### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat atau *mengcopy* dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Dokumen yang diperlukan antara lain : Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016, Laporan perincian PAD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 dari SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan

RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

#### Metode Analisis Data

Menurut teori Moh.Mahsun (2006 :154) tahap-tahap analisis data anggaran diuraikan sebagai berikut :

1. Siapkan data-data Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran.
2. Bandingkan Data-Data Realisasi Anggaran Dengan Anggarannya untuk setiap *Item* yang sama.
3. Hitung selisih anggaran.
4. Hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran.
5. Lakukan *Analytical procedure* dengan pembuatan rasio-rasio kinerja.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km<sup>2</sup> dengan populasi berjumlah 3.626.616 jiwa (2010).

Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan

Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya provinsi Kalimantan, setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan gubernur Dokter Moerjani. Secara historis wilayah Kalimantan Selatan mula-mula dibentuk merupakan wilayah Karesidenan Kalimantan Selatan di dalam Propinsi Kalimantan itu sendiri.

#### HASIL TABULASI DAN ANALISIS DATA RASIO KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013-2015

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berikut ini hasil analisis rasio kemandirian keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016 :

**Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014- 2016**

Uraian	Rasio Kemandirian (%)	Pertumbuhan Rasio Kemandirian (%)
Tahun 2014	1,91%	- 0,26%
Tahun 2015	1,99%	0,08%
Tahun 2016	1,79%	- 0,20%

Sumber : Data diolah, 2017.



Provinsi Kalimantan Selatan dengan rasio kemandirian daerah rata-rata dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014-2016 yang mencapai 1,90% mengintrepetasikan pola kemandirian yang masih instruktif. Pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pola instruktif tersebut yang membuat ketergantungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Hal itu diperkuat dengan pendapatan transfer Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan, pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat-lainnya, dana otonomi khusus, dana penyesuaian, pendapatan bagi hasil pajak, dan pendapatan bagi hasil lainnya yang mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil analisis data yang tersaji pada tabel di atas pada dasarnya pendapatan transfer daerah Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh perolehan transfer pemerintah pusat atau yang sering disebut sebagai dana perimbangan dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat pada tahun 2014 mencapai Rp. 1.531.320.000,00, tahun 2015 mencapai Rp. 1.474.714.660.000,00, dan tahun 2016 mencapai Rp. 1.639,220.000,00.

Berdasarkan analisis *time series* tersebut dapat terlihat peningkatan persentase pendapatan dana perimbangan Provinsi Kalimantan Selatan dari pemerintah pusat, walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3,7%. Tahun 2014, Tahun 2015, dan Tahun 2016 peningkatan pendapatan dana perimbangan tidak terlalu signifikan hanya sebesar 20,6%, -3,7%, 11,2%. Jika dianalisis dari pendapatan dana alokasi umum dari transfer APBN, pertumbuhan dana alokasi umum Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan fluktuatif. Tahun 2014 dana alokasi umum Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp. 701.730.000.000,00, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp. 571.240.000.000,00 pada tahun 2015. Sedangkan Tahun 2016 DAU Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan menjadi Rp. 779.520.000.000,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola hubungan kemandirian daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata mencapai 1,90%.

#### **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Berikut ini hasil analisis rasio efektivitas keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016 :

**Tabel Perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 - 2016**

Tahun	Rasio Efektifitas	Pertumbuhan
2014	100,8%	1,32%
2015	91,9%	- 8,9%
2016	84,7%	- 7,2%

Sumber : Data diolah , 2017.

Pada tahun 2014 dengan rasio efektifitas keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 100,8% dapat dikatakan “efektif”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengefektifkan realisasi PAD-nya yang bersumber dari Pendapatan asli daerah, pendapatan pajak, pendapatan retribusi, Pendapatan hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dengan baik. Pada tahun 2015 dengan rasio efektifitas keuangan Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 91,9% termasuk dalam kategori “tidak efektif”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat mengefektifkan realisasi PAD-nya yang bersumber dari Pendapatan asli daerah, pendapatan pajak, pendapatan

retribusi, Pendapatan hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah dengan baik. Tahun 2016 dengan rasio efektifitas keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 84,7% dapat dikatakan “tidak efektif”. Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat mengefektifkan realisasi PAD-nya yang bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, Pendapatan hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah dengan baik.

#### **Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Berikut ini hasil analisis rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016 :

**Tabel Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 - 2016**

Tahun	Rasio Efisiensi (%)	Pertumbuhan Rasio Efisiensi (%)
2014	1,02%	- 0,63%
2015	1,90%	0,88%
2016	1,77%	- 0,13%

Sumber : Data diolah , 2017.

Pada tahun 2014 rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 1,02% termasuk dalam kategori “efisien”. Komponen dari total belanja ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sedangkan komponen dari pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2015 rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 1,90% termasuk dalam kategori “efisien”. Semakin tinggi rasio efisiensi keuangan semakin tidak efisien pengelolaan keuangan pada daerah tersebut. Pada tahun 2016 ini peningkatan realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada perolehan realisasi pendapatan daerah. Hal inilah yang

menyebabkan peningkatan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015. Pada tahun 2016 rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 1,77% termasuk dalam kategori “efisien”. Penurunan rasio efisiensi tahun 2016 ini karena terjadi peningkatan pada pendapatan daerah dan penurunan belanja daerah. Pada tahun 2016 ini terjadi penurunan rasio efisiensi yang artinya bahwa pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan semakin efisien. Hal ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan perolehan pendapatan daerah lebih besar daripada realisasi belanjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 termasuk kategori “efisien”.

**Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja.**

Berikut ini hasil perhitungan rasio aktivitas yang meliputi rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total Belanja Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 :

**Tabel Perhitungan Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016**

Uraian	Rasio Belanja Rutin Terhadap Total Belanja (%)	Pertumbuhan Rasio Belanja Rutin Terhadap Total Belanja (%)	Rasio Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja (%)	Pertumbuhan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja (%)
Tahun 2014	47,73%	- 4,37%	52,27%	4,37%
Tahun 2015	46,51%	- 1,22%	53,49%	1,22%
Tahun 2016	47,66%	1,15%	52,34%	- 1,15

Sumber : Data diolah, 2017.

**Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)**

Berikut hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja pada APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 :

**Tabel Perhitungan Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 - 2016**

Uraian	Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PAD	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Belanja Pembangunan	Pertumbuhan Realisasi Belanja Rutin
Tahun 2014	6,32%	1,02	4,37%	- 4,37%
Tahun 2015	- 8,90	- 3,2	1,22%	- 1,22%
Tahun 2016	8,71	3,74	- 1,15	1,15%

Sumber : Data diolah, 2017.

**Analisis Aspek Pembiayaan Provinsi Kalimantan Selatan**

Berikut hasil analisis aspek pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan baik dari sisi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dengan melihat tren pertumbuhannya :

**Tabel Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 - 2016**

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Penerimaan Pembiayaan Daerah			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp. 430.000.000.000,-	Rp. 420.000.000.000,-	Rp. 200.000.000.000,-
Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0,00	Rp. 130.000.000.000,-	Rp. 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Penerimaan Piutang Daerah	Rp. 185.000.000.000,-	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Dana Talangan	Rp. 40.000.000.000,-	Rp. 16.000.000.000,-	Rp. 3.000.000.000,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 655.000.000.000,-	Rp. 566.000.000.000,-	Rp. 203.000.000.000,-

Sumber : Data diolah kembali, 2017.

Berdasarkan tabel diatas SILPA yang muncul pada penerimaan pembiayaan di realisasi pembiayaan tahun 2014-2016 merupakan penggunaan dana sisa kelebihan anggaran tahun sebelumnya untuk menutupi defisit. Menurunnya pertumbuhan SILPA pada tahun 2014, 2015 dan 2016 menunjukkan terjadinya defisit. Hal ini merupakan tanda bahwa kinerja keuangan kurang baik karena kurangnya kemampuan Pemda dalam mengestimasi pendapatan dan belanja, dan kemampuan SKPD dalam

melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak selalu sisa anggaran yang berasal dari kegiatan yang telah selesai 100% sebagai efisiensi, tetapi bisa juga diartikan sebagai ukuran besarnya “oportunisma” (dengan menggelembungkan anggaran) yang dilakukan oleh SKPD (*agency sebagai budget maximizer*).

Berikut ini tabel yang menyajikan pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 :

**Tabel Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 - 2016**

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Pengeluaran Pembiayaan			
Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 50.000.000.000,-	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 0,00	Rp. 15.000.000.000,-	Rp. 25.000.000.000,-
Pembayaran Pokok Hutang	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Dana Talangan	Rp. 40.000.000.000,-	Rp. 16.000.000.000,-	Rp. 3.000.000.000,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 90.000.000.000,-	Rp. 31.000.000.000,-	Rp. 28.000.000.000,-

Sumber : Data diolah kembali, 2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2014-2016. Aspek yang paling menonjol adalah aspek penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Aktivitas investasi keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah investasi permanen berupa penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan daerah. Perkembangan nilai investasi tersebut selalu meningkat. Hal ini menunjukkan peran aktif pemerintah dalam membantu memajukan perusahaan-perusahaan daerah. Selain itu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menunjukkan tidak adanya aktivitas divestasi atau privatisasi untuk melepas aset daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga tidak mempunyai hutang jangka panjang. Hutang yang dimiliki hanya hutang jangka pendek yang berupa hutang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya.

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Pola hubungan kemandirian daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah

rata-rata mencapai 1,90%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah. Jadi secara keseluruhan ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan seperti kemandirian keuangan Provinsi Kalimantan Selatan yang masih rendah dan aktifitas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. Kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan baik karena pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

### Saran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebaiknya memperbaiki penganggarannya dengan cara melihat data perkembangannya, minimal selama tiga tahun terakhir. Menggunakan data yang telah diperbarui dan diverifikasi agar perencanaan dan prediksinya lebih akurat.

Optimalisasi PAD khususnya kepada sumber pendapatan yang berpotensi prima dengan memberikan bantuan dana, berperan aktif melakukan pembimbingan dan pemecahan masalah serta memperhatikan perkembangannya.

Meningkatkan pembangunan pada sektor utama yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik daerah, pembangunan jalan, irigasi, jaringan serta fasilitas umum masyarakat.

Pertumbuhan belanja rutin sebaiknya ditekan sebaliknya pertumbuhan belanja pembangunan makin ditingkatkan dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah.

Bagi peneliti selanjutnya penetapan waktu penelitian diusahakan tidak diawal dan akhir tahun anggaran karena selain dari pihak pemprov sibuk menyelesaikan laporan keuangan, data yang didapatkan terkait dengan laporan keuangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan juga tidak bisa maksimal karena diperlukannya waktu audit oleh BPK sehingga data tersebut dapat keluar atau dipublikasikan.

Untuk peneliti selanjutnya harap memperhatikan proses perhitungan rasio efisiensi karena harus menjumlahkan upah pungut PAD pada masing-masing SKPD sehingga akan mengalami kesulitan untuk mengakses data dan informasi karena kesemuanya itu sudah terintegrasi dalam SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Provinsi Kalimantan Selatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahzir Erfa, 2008, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Otonomi Khusus (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Astuti, W., 2015, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Periode 2007-2011)*, *Jurnal EBBANK*. VI(1). 1-18.
- Halim, Abdul dkk, 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah dan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahsun, Mohammad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFPE.
- Martha, Yurdila Janur, 2008, *Analisis terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah tahun 2003 – 2007*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Martini, K dan Dwirandra, A.A.N.B., 2015, *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali*. *E-Jurnal Akuntansi*. X(2). 426- 443.
- Nurhayati, 2015, *Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. IV(1). 55-66.
- Puspitasari, Ayu Febriyanti, 2013, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Ulum, Ihyaul, 2012, *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yusuf, Mohammad, 2010, *Langkah Pengelolaan Aset Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Jakarta : Salemba Empat.